



## ASOSIASI KEPALA DAERAH PROVINSI SE-TANAH PAPUA

Nabire, 5 Mei 2026

Nomor : 100.1.2/024/AKDH/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui penguatan implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan:

**Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua:**  
*“Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera”*

yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin–Selasa, 11–12 Mei 2026  
Waktu : Pukul 08.30 – 17.00 WIT  
Tempat : Hotel Horison Diana Timika

Sehubungan dengan pentingnya agenda dimaksud, kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi aktif Bapak/Ibu guna memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi ibu Vivian A. Gobay, S.IP., M.M (0852-4431-8380) dan Bapak Elieser Yogi, S.STP., M.Si (0853-4455-3186).

Demikian surat undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
Ketua Asosiasi Kepala Daerah  
Provinsi Se-Tanah Papua,  
  
Meki Nawipa

Lampiran

Nomor : 100.1.2/024/AKDH/2026

Tanggal : 5 Mei 2026

## Daftar Undangan

### I. Kementerian/ Lembaga

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN/ Kepala Bappenas;
4. Kepala Sekretariat Wakil/ Presiden RI;
5. Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua
6. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua;
7. Pimpinan/ Perwakilan komisi II DPR RI
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kemenkeu;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah – Kemendagri;
10. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kemendagri;
11. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan – Bappenas;
12. Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan;
13. Direktur Dana Desa Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan (DDIOKK) – Kemenkeu;
14. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan – Kemenkeu;
15. Direktur Pembangunan Indonesia Timur – Bappenas;
16. Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah – Kemendagri;
17. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah – Kemendagri;
18. Ketua Tim Reguler Dana Otsus – Kemenkeu;
19. Deputi 1 Bidang koordinasi Politik dalam Negeri – Kemenko polhukam;
20. Kepala Kanwil DJPb Papua;
21. Kepala Kanwil DJPb Papua Barat;

### II. Pemerintah Provinsi se- Tanah Papua

Unsur yang diundang dari setiap Provinsi:

- a. Ketua MRP;
- b. Ketua DPRP;
- c. Gubernur;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi;
- e. Kepala BAPPERIA/BAPPEDA Provinsi;
- f. Kepala BPPKAD Provinsi;
- g. Inspektur Provinsi;
- h. Kepala Dinas Kesehatan;
- i. Kepala Dinas Pendidikan;
- j. Kepala Dinas PUPR;
- k. Kepala OPD Pengampu Tema Papua Produktif;

### III. Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Tanah Papua

Unsur yang diundang dari setiap Kabupaten/ Kota

- a. Bupati/ Walikota;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. Kepala BAPPEDA;
- d. Kepala BPPKAD;
- e. Inspektur Daerah;
- f. Kepala Dinas Kesehatan;
- g. Kepala Dinas Pendidikan;
- h. Kepala Dinas PUPR;
- i. Kepala OPD Pengampu Tema Papua Produktif.

IV. Mitra Pembangunan

1. DFAT – Kedutaan Besar Australia;
2. Tim Leader SKALA;
3. Universitas Papua.

## Kerangka Acuan Kegiatan

# Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua

### *Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera*

*Timika, 11 – 12 Mei 2026*

#### A. Latar Belakang

Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 saat ini telah didukung oleh penguatan tata kelola melalui berbagai perangkat regulasi, mulai dari PP 107 Tahun 2021 tentang Rencana Induk dan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otsus, Perpres 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP, Perpres 24 Tahun 2023 tentang RIPPP, serta PMK 33/2024 ttg Pengelolaan TKD Dalam Rangka Otsus. Di samping itu, dari sisi dukungan sistem informasi juga telah dibangun integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui interoperabilitas sistem antara SIPPP, SIPD, dan SIKD.

Namun demikian, perbaikan kebijakan melalui perangkat regulasi dan sistem informasi tersebut belum dibarengi dengan pemahaman yang baik di pemerintah daerah sehingga implementasi kebijakan di lapangan belum optimal. Oleh karena itu, masih diperlukan penguatan pemahaman yang komprehensif, khususnya pada level pimpinan daerah serta lembaga representatif daerah seperti DPRD dan MRP.

Hasil evaluasi pelaksanaan tata kelola dalam 4 tahun terakhir menunjukkan masih diperlukan penguatan pemahaman dan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Otonomi Khusus. Di sisi lain, Pemerintah Pusat berkepentingan untuk mengawal dan memastikan agar kehadiran dana otsus dapat benar-benar menghadirkan kemanfaatan yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sebagai bagian dari upaya menghadirkan kemanfaatan Daan Otonomi Khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, pada tanggal 13 April 2026 Pemerintah pusat resmi menaikkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk tahun anggaran 2026 menjadi Rp 12,69 triliun. Angka ini meningkat signifikan sebesar Rp 2,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 10 triliun. Keputusan strategis tersebut ditetapkan usai audiensi enam gubernur se-Tanah Papua dengan jajaran Kementerian Keuangan. Kenaikan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan workshop/lokakarya pada level eksekutif sebagai forum strategis untuk memberikan pembekalan, menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, serta memperkuat peran pimpinan daerah dan lembaga pengawasan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Kegiatan ini akan mengambil tema **“PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PAPUA YANG LEBIH SEJAHTERA”**.

## B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pimpinan daerah dan lembaga representatif terkait kebijakan Dana Otonomi Khusus
2. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan pemahaman teknis perangkat daerah dalam pengelolaan Dana Otsus
4. Menguatkan peran DPRP dan MRP dalam pengawasan Dana Otonomi Khusus.

## C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan di akhir kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan pemahaman kebijakan Dana Otsus di level eksekutif
2. Penguatan kapasitas teknis perangkat daerah
3. Terbangunnya koordinasi pusat dan daerah
4. Penguatan peran pengawasan DPRP dan MRP

## D. Kegiatan

Forum Strategis ini akan diadakan pada:

**Hari, Tanggal** : Senin – Selasa, 11 – 12 Mei 2026

**Tempat** : Hotel Horison Diana, Timika

**Waktu** : 08.30 – 17.00 WIT

Forum Strategis ini akan dilaksanakan dengan pembagian fokus sebagai berikut:

**Hari pertama:** workshop level pimpinan yang diikuti oleh pimpinan daerah, legislatif dan Kementerian/Lembaga, dengan narasumber pejabat eselon I dan II.

**Hari kedua:** workshop level teknis yang diikuti oleh perangkat daerah untuk pendalaman implementasi kebijakan, dengan narasumber pejabat eselon II dan III.

## E. Narasumber, Moderator, Fasilitator dan Panitia

### Kementerian dan Lembaga

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri PPN/Bappenas
4. Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI
5. Ketua Komite Eksekutif (KE) Percepatan Pembangunan Papua
6. Perwakilan Komisi II DPR-RI
7. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
8. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
9. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
10. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas

11. Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan
12. Direktur DDIOKK Kementerian Keuangan
13. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
14. Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas
15. Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri
16. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri
17. Ketua Tim Reguler Dana Otsus – DDIOKK Kementerian Keuangan
18. Tim Kementerian Keuangan
19. Tim Kementerian Dalam Negeri
20. Tim Bappenas

#### **Pemerintah Daerah**

1. Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua
2. Gubernur Papua Tengah
3. Gubernur Papua Selatan
4. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya
5. Kepala Bappeda Kabupaten Asmat
6. Tim Pemerintah Papua Tengah

#### **Mitra Pembangunan**

1. DFAT – Kedutaan Besar Australia
2. Team Leader SKALA
3. Tim SKALA

## **F. Peserta**

#### **Kementerian dan Lembaga**

1. Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kepala Kanwil DJPb Papua
3. Kepala Kanwil DJPb Papua Barat

#### **Lembaga Daerah**

Peserta kegiatan ini terdiri dari pimpinan instansi berikut dari 6 Provinsi dan 42 Kabupaten/Kota se-Tanah Papua, yang dibagi kepesertaannya di 2 hari kegiatan, dengan rincian sebagai berikut

No	Instansi	Jumlah Peserta per Instansi	Jumlah Prov/ Kab/ Kota	Senin, 11 Mei 2026 (Pertemuan Pimpinan)	Selasa, 12 Mei 2026 (Pertemuan Teknis)
1	BP3OKP	1	6	6	
2	Kepala Daerah	1	48	48	
3	Pimpinan DPR	3	48	144	
4	Pimpinan MRP	2	6	12	
5	Sekda	1	48	48	48

No	Instansi	Jumlah Peserta per Instansi	Jumlah Prov/ Kab/ Kota	Senin, 11 Mei 2026 (Pertemuan Pimpinan)	Selasa, 12 Mei 2026 (Pertemuan Teknis)
6	Bapperida/Bappeda	1	48		48
7	BPPKAD	1	48		48
8	Inspektorat	1	48		48
9	Dinas Kesehatan	1	48		48
10	Dinas Pendidikan	1	48		48
11	Dinas PUPR	1	48		48
12	Dinas pengampu tema Papua Produktif	3	48		144
				258	480

## G. Agenda

### **FORUM STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA**

#### **“PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PAPUA YANG LEBIH SEJAHTERA”**

*Timika, 11-12 Mei 2026*

*Senin, 11 Mei 2026: Pertemuan Pimpinan*

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 – 09.00	Registrasi	Panitia
	Tarian Penyambutan  Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyanyikan lagu Indonesia Raya</li> <li>▪ Menyanyikan lagu Papua Pulau Indah</li> <li>▪ Doa</li> <li>▪ Tayangan Video Singkat</li> </ul>	Panitia dan SKALA
09.00 – 09.10	Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan	Sekretaris Daerah Papua Tengah
09.10 – 09.20	Sambutan dan Pembukaan	1. Ketua Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua 2. Team Leader SKALA 3. Mendagri/Wamendagri <i>(sekaligus membuka Acara)</i>
09.20 – 09.30	<b>Penanda-tanganan Komitmen Bersama Pusat-Daerah dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Papua melalui Penyelenggaraan Tata Kelola Dana Otsus yang Baik dan Prudent oleh:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Keuangan</li> <li>2. Menteri Dalam Negeri</li> </ol>	

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</li> <li>4. Para Gubernur dari 6 provinsi di wilayah Papua</li> <li>5. Komite Eksekutif P2OKP</li> <li>6. Anggota BP3OKP 6 provinsi di wilayah Papua</li> </ol>	
09.30 – 12.00 (20 menit untuk masing- masing pemateri)	<b>Panel Sesi I (Presentasi)</b>	Moderator: Direktur Jenderal Otonomi Daerah – Kemendagri
	<b>Materi I:</b> Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua pasca UU 2/2021 dalam perspektif Legislatif	Komisi II DPR-RI
	<b>Materi II:</b> Grand Design Pembangunan Papua menuju Papua yang Sejahtera	Menteri PPN/Kepala Bappenas
	<b>Materi III:</b> Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Otonomi Khusus sebagai Manifestasi Desentralisasi Asimetris dan Kebijakan Tambahan Dana Otsus TA 2026	Menteri Keuangan
	<b>Materi IV:</b> Peran Strategis BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dalam Mengawal Percepatan Pembangunan Papua	Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI
	<b>Materi V:</b> Evaluasi Implementasi Kebijakan Dana Otsus pasca UU 2/2021 dalam perspektif Daerah	Gubernur Papua Tengah
	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.00 – 12.10	<b>Kick-off Interoperabilitas SIPPP-SIPD-SIKD secara Simbolis dilanjutkan dengan Pemutaran Video Interoperabilitas SIPD-SIPPP-SIKD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri/Wakil Menteri Dalam Negeri</li> <li>2. Menteri Keuangan</li> <li>3. Menteri PPN/Bappenas</li> </ol>
<b>12.10 – 13.00</b>	<b>ISHOMA dan Wawancara Media</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri/Wakil Menteri</li> <li>2. Gubernur</li> </ol>
13.00 – 16.00 (15 menit untuk masing- masing narasumber talkshow)	<b>Panel Sesi II (Talkshow)</b>	Moderator: Direktur DDIOKK Kemenkeu
	<b>Materi I:</b> Pembagian Kewenangan dan Penguatan Peran Kelembagaan Otonomi Khusus Papua	Dirjen Otda
	<b>Materi II:</b> Evaluasi Implementasi Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan – Bappenas
	<b>Materi III:</b> Kebijakan Umum Penerimaan Dalam Rangka Otsus berdasarkan UU2/2021 dan PP 107/2021	Dirjen Perimbangan Keuangan – Kemenkeu
	<b>Materi IV:</b> SIKD Next Generation dan kebijakan Interoperabilitas antar Sistem SIPPP, SIPD, SIKD	Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
	<b>Materi V:</b> Peran Pemerintah Daerah dalam mengawal Implementasi Interoperabilitas	Gubernur Provinsi Papua Selatan
	<b>Materi VI:</b> Akan diinformasikan kemudian	Perwakilan UNIPA
16.00 – 16.30	Diskusi Level Pimpinan	Moderator: Direktur DDIOKK
16.40 – 17.00	Penutup	Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua

*Selasa, 12 April 2026 (Pertemuan Teknis)*

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyanyikan lagu Indonesia Raya</li> <li>▪ Menyanyikan lagu Tanah Papua</li> <li>▪ Doa</li> </ul>	Panitia
09.00 – 09.15	Sambutan dan Pembukaan	1. Team Leader SKALA 2. Sekda Provinsi Papua Tengah (sekaligus membuka acara)
09.15 – 12.30	<b>Sesi Panel I</b> Optimalisasi Implementasi Kebijakan Dana Otsus Papua	Moderator: Ketua TR Otsus
	<b>Materi I:</b> Mengawal Konsistensi Perencanaan RAPPP dengan RKPD dan Musrenbang Otsus	Dir. Pembangunan Indonesia Timur – Bappenas
	<b>Materi II:</b> Kebijakan Umum Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otsus berdasarkan PMK 33 Tahun 2024	Dir. DDIOKK - Kemenkeu
	<b>Materi III:</b> Kebijakan Monev dan Pembinaan Penerimaan Dalam Rangka Otsus	Dir. FTPUD - Kemendagri
	<b>Materi IV:</b> Grand Design Interoperabilitas antar sistem tata kelola dana otsus: peluang, dampak, dan tantangannya	Dir. SPK - Kemenkeu
	<b>Materi V:</b> Perencanaan Anggaran Daerah dalam konteks Interoperabilitas SIPPP, SKPD, SIKD	Dir. PAD - Kemendagri
	<b>Materi VI:</b> Strategi Mengawal Implementasi Interoperabilitas (Task Force dan Tim Interoperabilitas)	Dir. DDIOKK - Kemenkeu
12.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 16.00	<b>Sesi Panel II</b>	Moderator:

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
	Perbaiki dan Penguatan Tata Kelola Dana Otsus melalui Revisi PMK 33 Tahun 2024	SKALA
	<b>Materi I:</b> Evaluasi Pelaksanaan PMK 33/2024 dan point-point arah perubahannya	Dir. DDIOKK - Kemenkeu
	<b>Materi II:</b> Implementasi PMK 33/2024 dalam perspektif Pemerintah Daerah	1. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya 2. Kepala Bappeda Kab. Asmat
	<b>Materi III:</b> Masukan terhadap rencana perubahan PMK 33/2024 – Pemanfaatan data sosial ekonomi terpilah OAP untuk pensasaran kegiatan	SKALA
	Diskusi Teknis	Moderator
16.00 – 16.30	Penutupan	Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah

## H. Pembiayaan

Kegiatan ini didanai bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Papua Tengah dan SKALA serta pemerintah daerah, DPR, MRP, BP3OKP se-Tanah Papua, dengan pembagian peran sebagai berikut:

### Pemerintah Pusat:

- Biaya koordinasi
- Penyiapan materi-materi rapat

### Pemerintah Papua Tengah:

- Tiket, akomodasi, transportasi, per diem dan honor narasumber eselon I dari pusat.
- Ruang pertemuan, multimedia, grup penari dan konsumsi
- Biaya perjalanan dinas panitia, peserta dari Pemerintah Papua Tengah

### Pemerintah Daerah, DRP, MRP dan BP3OKP dari 47 provinsi/kabupaten/kota:

- Biaya perjalanan dinas peserta

### SKALA:

- Tiket, akomodasi, transportasi, per diem dan honor narasumber eselon II, III dan staff dari pusat